

FAKTOR PENGHAMBAT PENGAWASAN SISTEM PARKIR ELEKTRONIK OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA

Muhamad Candra Aji Saputro, Bambang Irawan

**eJournal Administrasi Publik
Volume 13, Nomor 3, 2025**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Faktor Penghambat Pengawasan Sistem Parkir Elektronik Oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

Pengarang : Muhamad Candra Aji Saputro

NIM : 2102016009

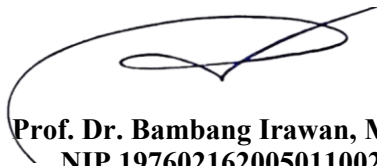
Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 21 November 2025

Pembimbing,



Prof. Dr. Bambang Irawan, M.Si.
NIP 197602162005011002

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan	: eJournal Administrasi Publik
Volume	: 13
Nomor	: 3
Tahun	: 2025
Halaman	: 815-826

FAKTOR PENGHAMBAT PENGAWASAN SISTEM PARKIR ELEKTRONIK OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA

Muhamad Candra Aji Saputro ¹, Bambang Irawan ²

Abstrak

Pengawasan sistem parkir elektronik merupakan tahapan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam memastikan bahwa program yang dijalankan telah sesuai dengan aturan serta tidak terjadi adanya penyimpangan dilapangan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat, mengetahui dan menggambarkan apa yang menjadi faktor penghambat pengawasan sistem parkir elektronik oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif yang berfokus pada faktor-faktor yang menghambat pengawasan sistem parkir elektronik oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi, sedangkan Analisis data yang digunakan ialah model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor penghambat dalam pengawasan sistem parkir elektronik oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda ialah masih belum adanya regulasi dan target khusus yang secara jelas mengatur tentang penerapan serta mekanisme pengawasan sistem parkir elektronik, adanya keterbatasan sumber daya manusia dalam sisi pengawasan, keterbatasan fasilitas peralatan yang dapat menunjang kinerja pengawasan, dan minimnya partisipasi dan kesadaran masyarakat, baik dari pihak pengguna parkir maupun pengelola, dalam mendukung penerapan sistem parkir elektronik.

Kata Kunci : *Faktor Penghambat, Pengawasan, Sistem Parkir Elektronik, Dinas Perhubungan, Kota Samarinda*

Pendahuluan

Samarinda merupakan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur yang mempunyai jumlah penduduk terbesar, dengan lajunya pertumbuhan penduduk maka semakin banyak juga angka kepemilikan kendaraan bermotor di Samarinda. Oleh karena itu, parkir merupakan aset penting setiap daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sisi retribusi parkir (Hadijah, 2016). Namun, padatnya area parkir tidak sepadan dengan retribusi parkir yang didapatkan (Ummah, 2022).

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: ajicandra110@gmail.com

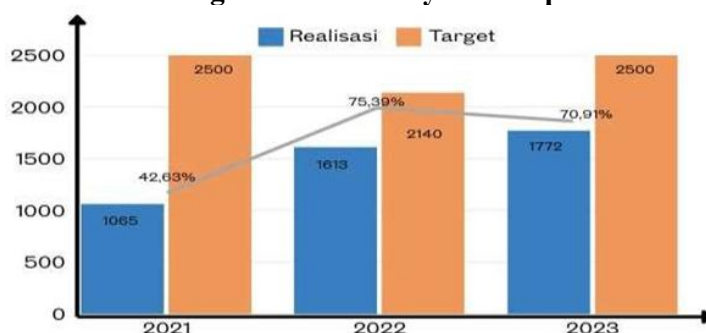
² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Seiring perkembangan teknologi, pemerintah Kota Samarinda berupaya memberikan pelayanan publik yang lebih terukur agar dapat menyelesaikan berbagai permasalahan termasuk parkir. Dengan mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 910/1867/SJ Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Parkir Non Tunai, Walikota Samarinda meresmikan Sistem Parkir Elektronik (E-Parking) pada 3 Mei 2021, dan Dinas Perhubungan Kota Samarinda sebagai pelaksana program.

Dalam mengelola Sistem Parkir Elektronik, diperlukan pengawasan yang efektif untuk mengatur segala aspek yang terlibat sehingga program dapat berjalan maksimal (Rusdiana, 2014). Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang bertanggung jawab untuk menentukan apa yang dilakukan, mengevaluasi pelaksanaan, dan menetapkan tindakan perbaikan untuk memastikan bahwa pelaksanaan sesuai dengan tujuan (Permana & Agustina, 2022). Pengawasan sangat penting karena dalam mengidentifikasi potensi hambatan yang muncul selama pelaksanaan program dan mengambil tindakan agar dapat mengatasinya (Permana et al, 2022). Adanya pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program ataupun inovasi dapat terealisasi sesuai tujuan (Syahputri, 2023). Meskipun Sistem Parkir Elektronik sudah berjalan selama 3 tahun, namun belum memberikan hasil optimal pada peningkatan retribusi parkir di Kota Samarinda. Hal ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 1

Realisasi dan Target Retribusi Layanan Tepi Jalan Umum



Sumber: Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Kota Samarinda

Menurut data dari Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Kota Samarinda Tahun 2023 menunjukkan, bahwa dengan adanya penerapan sistem parkir elektronik tidak dapat meningkatkan retribusi parkir secara signifikan. Dengan masih kurang optimalnya sistem parkir elektronik dalam mencapai target, maka hal ini disinyalir karena lemahnya pengawasan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam menjalankan sistem parkir elektronik. Pernyataan ini diperkuat dari media Sapos.co.id (2023), menyatakan bahwa masih terdapat oknum petugas parkir yang meminta pungutan tunai tanpa adanya pemberian arahan terlebih dahulu tentang mekanisme pembayaran *E-Parking*.

Dalam praktiknya, pelaksanaan Pengawasan Sistem Parkir Elektronik Oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda belum sepenuhnya berjalan optimal. Terdapat beberapa permasalahan ditemukan, baik di tingkat pelaksana program dan diluar pelaksana program. Serta adanya berbagai hambatan, mulai dari kejelasan standar, penetapan target, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya fasilitas peralatan, hingga minimnya partisipasi masyarakat, menjadi tantangan dalam memaksimalkan efektivitas program tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penghambat dalam Pengawasan Sistem Parkir Elektronik Oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam upaya penyempurnaan manajemen pengawasan serta penguatan kualitas pengawasan pada Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

Kerangka Dasar Teori

Manajemen Publik

Menurut Ghofur (2014), manajemen publik merupakan sebuah ilmu atas manajemen pemerintahan, yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengontrolan dalam melayani masyarakat (Ghofur, 2014). Konsep ini menekankan bahwa manajemen publik merupakan suatu disiplin ilmu yang berfokus pada pengelolaan kegiatan pemerintahan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Firdausijah et al (2023), manajemen publik adalah penelitian interaktif tentang aspek umum organisasi dan mencakup fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerak, dan pengendalian dengan sumber daya manusia, keuangan, fisik, informasi, dan publik.

Lalu menurut Irawan (2023) mengatakan, bahwa manajemen publik adalah pelajaran yang menggabungkan berbagai hal umum organisasi dan menggabungkan antara fungsi manajemen dan SDM, informasi, finansial, dan publik. Konsep ini menekankan bahwa manajemen publik merupakan suatu disiplin ilmu yang bersifat integratif, di mana berbagai aspek umum dalam organisasi pemerintahan dipadukan untuk menciptakan sistem pengelolaan yang efektif dan efisien.

Dengan demikian, manajemen publik merupakan konsep yang melibatkan berbagai aspek, termasuk perencanaan, pengorganisasian, pengontrolan, dan pelayanan kepada masyarakat. Manajemen publik juga melibatkan studi interdisipliner dan multidisiplin yang menggabungkan fungsi manajemen dengan sumber daya manusia, keuangan, informasi, dan aspek publik lainnya.

Pengawasan

Menurut Omposunggu (2019), Salah satu fungsi manajemen yang paling penting untuk memastikan suatu tujuan organisasi dapat dicapai adalah pengawasan, yang mencakup serangkaian tindakan dan prosedur yang

dimaksudkan untuk memantau, mengevaluasi, dan mengontrol aktivitas dan kinerja organisasi agar sesuai dengan rencana. Pengawasan menurut George R. Terry dalam Permana et al (2022) mengatakan, pengawasan adalah proses menentukan apa yang dilakukan, mengevaluasi pelaksanaan, dan menentukan bilamana perlu melakukan perbaikan agar pelaksanaan berjalan sesuai dengan rencana. Sedangkan menurut Siagian dalam Zailani & Subarkah (2022) menjelaskan, pengawasan adalah proses mengamati bagaimana seluruh kegiatan organisasi dijalankan untuk memastikan bahwa semua pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana.

Dapat disimpulkan, bahwa pengawasan merupakan tahap dalam manajemen yang bertujuan untuk membandingkan kinerja dengan standar, rencana, atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga dapat menilai apakah kinerja tersebut sesuai dengan standar aturan yang berlaku.

Sistem Parkir Elektronik

Seiring perkembangan teknologi, pemerintah Kota Samarinda berupaya memberikan pelayanan publik yang lebih terukur agar dapat menyelesaikan berbagai permasalahan termasuk parkir. Dengan mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 910/1867/SJ Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Parkir Non Tunai, Walikota Samarinda meresmikan Sistem Parkir Elektronik (*E-Parking*) pada 3 Mei 2021, dan Dinas Perhubungan Kota Samarinda sebagai pelaksana program.

Sistem Parkir Elektronik (*E-Parking*) menurut Artamalia & Prabawati (2019) mengatakan, bahwa *E-Parking* merupakan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi guna memberikan pelayanan kepada masyarakat. Lalu menurut Pahlevi & Jumansyah (2023) mengatakan, *E-Parking* mengatasi masalah layanan parkir pemerintah dengan menggunakan teknologi informasi sektor publik.

Sedangkan menurut Koordinator Sub Parkir Dinas Perhubungan Kota Samarinda mengatakan, bahwa Sistem Parkir Elektronik merupakan sebuah inovasi dengan mengandalkan perkembangan teknologi sehingga merubah mekanisme pembayaran yang awalnya tunai menjadi non tunai. Tujuan dari adanya Sistem Parkir Elektronik (*E-Parking*) bertujuan untuk mempermudah transaksi parkir dan mempercepat proses pembayaran (Hayati & Fanida, 2018).

Jadi dapat disimpulkan, bahwa Sistem parkir elektronik (*E-Parking*) merupakan inovasi yang dilakukan pemerintah untuk membantu masyarakat dengan menggunakan kecanggihan teknologi. *E-Parking* merupakan inovasi yang menggunakan teknologi informasi untuk mengatasi masalah khususnya perparkiran. Dengan menggunakan sistem *E-Parking*, mekanisme pembayaran parkir yang sebelumnya berupa uang tunai telah berubah menjadi non tunai.

Definisi Konsepsional

Menurut Anwar (2022), definisi konsepsional merupakan sebuah batasan konsep yang menjelaskan suatu objek dengan kata kata. Jadi definisi konsepsional dijadikan sebagai unsur pokok dari suatu penelitian agar suatu persoalan tidak menjadi kabur, dan juga menghindarkan terjadinya salah pengertian dari konsep yang akan digunakan dan membatasi sebuah permasalahan.

Metode Penelitian

Menurut Anwar (2022), definisi konsepsional merupakan sebuah batasan konsep yang menjelaskan suatu objek dengan kata kata. Jadi definisi konsepsional dijadikan sebagai unsur pokok dari suatu penelitian agar suatu persoalan tidak menjadi kabur, dan juga menghindarkan terjadinya salah pengertian dari konsep yang akan digunakan dan mPenelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif dengan berfokus pada faktor-faktor yang menghambat Pengawasan Sistem Parkir Elektronik Oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Habsy (2017), penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang menggunakan data deskriptif lisan atau tertulis tentang sikap dan perilaku individu yang diamati. Jenis penelitian ini memiliki tujuan untuk menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat dalam bentuk deskriptif mengenai kondisi nyata yang ditemukan di lapangan, dengan fokus utama untuk mengidentifikasi dan memahami permasalahan yang terjadi.

Adapun sumber data primer yang digunakan terdiri atas hasil wawancara dari key informan, Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Selanjutnya, sumber data sekunder terdiri dari Peraturan Walikota Samarinda, dan Juknis, buku-buku ilmiah, jurnal dan literatur lainnya yang relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi, sedangkan Analisis data yang digunakan ialah model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Faktor Penghambat Pengawasan Sistem Parkir Elektronik Oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda

1. Kejelasan Standar Operasional Prosedur

SOP (*Standard Operating Procedure*) adalah panduan tertulis yang menjelaskan langkah-langkah yang perlu diikuti dalam melaksanakan suatu tugas atau proses dalam organisasi atau perusahaan (Adi, 2022). Tujuan dari SOP adalah untuk memastikan bahwa setiap aktivitas dilakukan secara konsisten, efisien, dan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Tantangan yang harus diperhatikan yaitu kejelasan standar, dengan standar yang jelas maka dapat meningkatkan kualitas pelaksana program. Hal ini selaras dengan hasil temuan

penelitian oleh Rahmawati dan Suryana (2024) menemukan bahwa penerapan SOP meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemahaman petugas pelaksana program. Dengan ada standar yang jelas secara spesifik dan tidak ambigu, maka dapat dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan yang terlibat

Kejelasan Standar Operasional Prosedur dalam Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda menjadi tantangan dalam pelaksanaan program Sistem Parkir Elektronik. Standar Operasional Prosedur *E-Parking* lebih menekankan pada tugas juru parkir dilapangan dalam melakukan pelayanan *E-Parking*. Kejelasan standar operasional prosedur yang mencakup tentang teknis pelaksanaan merupakan hal yang penting agar pekerjaan dapat konsisten dan efektif. Pengawas E-Parkir seharusnya memiliki peran yang tidak kalah penting dengan juru parkir dalam memastikan kelancaran dan efektivitas operasional. Namun, tanpa adanya pedoman yang jelas mengenai peran, tanggung jawab, dan prosedur pengawasan, pengawas akan kesulitan dalam menjalankan tugasnya secara optimal. Tanpa acuan yang pasti, mereka berisiko membuat keputusan yang tidak konsisten atau bahkan bertentangan dengan kebijakan yang ada, yang tentunya dapat mengurangi kualitas pengawasan

2. Tidak Adanya Target Khusus

Target merupakan hal yang sangat penting dalam menilai atau mengukur keberhasilan suatu program (Salama dan Manuri, 2023). Sehingga dalam penentuannya diperlukan kajian yang terperinci dan terstruktur setiap aspeknya. Sejalan dari temuan Sitorus (2012), target yang spesifik memastikan bahwa sasaran yang ingin dicapai dijelaskan dengan jelas dan tidak ambigu, sedangkan target yang terukur memungkinkan adanya evaluasi terhadap kemajuan yang telah dicapai. Apabila suatu program tidak memiliki target yang harus dicapai, maka dapat menimbulkan ketidakjelasan arah dan tujuan dari program tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan bahwa penetapan target pada sistem parkir elektronik di kota Samarinda tidak memiliki target khusus yang ditetapkan secara mandiri, melainkan target tersebut ditetapkan secara menyeluruh dalam kategori retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Kategori ini mencakup berbagai jenis layanan parkir, termasuk parkir tepi jalan umum, parkir berlangganan, serta pelayanan sistem parkir elektronik, yang secara keseluruhan menjadi satu kesatuan dalam penentuan target pencapaian.

Ketidakhadiran target yang spesifik untuk sistem parkir elektronik menyebabkan kesulitan dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja sistem tersebut, karena tidak ada indikator yang terfokus hanya pada sistem parkir elektronik. Selain itu, penetapan target yang menyeluruh untuk seluruh jenis layanan parkir membuat sulit untuk mengidentifikasi apakah pencapaian yang tercapai berasal dari sistem parkir elektronik atau layanan parkir lainnya. Hal ini menghambat usaha untuk mengidentifikasi masalah atau area yang membutuhkan perbaikan dalam sistem parkir elektronik. Tanpa adanya pemisahan yang jelas,

pengembangan dan peningkatan kualitas sistem parkir elektronik menjadi terhambat, karena evaluasi terhadap kinerjanya tidak dapat dilakukan dengan akurat. Akibatnya, sistem parkir elektronik berpotensi tidak berkembang dengan optimal, karena tidak ada data yang cukup untuk merancang strategi perbaikan yang tepat.

Berdasarkan temuan tersebut, kurangnya fokus pada sistem parkir elektronik sebagai unit yang terpisah dan ketidakjelasan dalam penetapan target ini menjadi faktor penghambat utama dalam upaya meningkatkan efektivitas dan kualitas layanan sistem parkir elektronik di Kota Samarinda. Agar sistem ini dapat berkembang dengan baik, diperlukan penetapan target yang lebih spesifik dan pemisahan yang jelas antara sistem parkir elektronik dan jenis layanan parkir lainnya. Hal ini akan memudahkan dalam pemantauan, evaluasi, dan pengambilan keputusan untuk pengembangan layanan sistem parkir elektronik yang lebih efisien dan berkualitas di masa depan.

3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) adalah elemen yang sangat vital dalam keberhasilan suatu sistem atau program, termasuk dalam pengelolaan layanan sistem parkir elektronik (Dipo et al, 2025). Sumber Daya Manusia yang berkualitas, terlatih, dan memadai jumlahnya dapat mendukung kelancaran operasional dan memastikan bahwa setiap tugas dilaksanakan dengan efisien (Prasetyani dan Atmaja, 2024). Apabila sumberdaya manusia mengalami kekurangan jumlah atau kualitas Sumber Daya Manusia yang tersedia maka dapat menjadi faktor penghambat yang serius dalam menjalankan sistem E-Parking secara optimal. Ketika jumlah tenaga kerja yang terlibat tidak mencukupi, tugas pengawasan, pemeliharaan, dan evaluasi layanan akan menjadi lebih berat dan tidak terkoordinasi dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor penting dalam memastikan efektivitas operasional. Sumberdaya manusia yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam menjalankan pengawasan masih terbilang kurang. Setidaknya satu orang pengawas E-parking harus mengawasi 10 orang juru parkir. Sehingga dengan perbandingan 1:10 maka dapat menciptakan ketidakpatuhan juru parkir dalam menjalankan tugasnya.

Temuan ini sejalan oleh Setiadewi et al (2019), menjelaskan bahwa seharusnya satu pengawas parkir hanya dapat mengawasi maksimal lima juru parkir. Jadi dengan ketidakseimbangan dalam rasio pengawasan ini dapat menyebabkan pengawas kesulitan dalam mengontrol dan menegakkan disiplin di antara para juru parkir. Beban kerja yang berlebihan pada SDM yang ada akan mengurangi fokus dan kualitas pelaksanaan tugas, yang pada gilirannya mempengaruhi pencapaian target yang telah ditetapkan, bahkan bisa menurunkan kualitas pelayanan secara keseluruhan. Oleh karena itu, sangat penting untuk

meningkatkan jumlah dan kualitas SDM yang terlibat dalam pengelolaan E-Parking.

4. Keterbatasan Fasilitas Peralatan

Fasilitas atau peralatan merupakan faktor penting yang harus dipenuhi sehingga dapat menunjang kinerja dari seorang pengawas. Dalam segi sumberdaya, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda masih kurang. Hal ini dikarenakan, terdapat temuan lapangan bahwa peralatan yang kurang seperti tidak adanya CCTV, dan mesin Electronic Data Capture (EDC) yang kurang.

Fasilitas seperti CCTV sangat diperlukan seorang pengawas dalam memantau ataupun mengontrol seorang juru parkir di lapangan setiap waktunya. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Octavianus et al (2024), menunjukkan bahwa pemasangan CCTV dapat mengurangi angka pencurian hingga 47,4%, yang menunjukkan betapa pentingnya peran sistem ini sebagai alat pencegah yang efektif. Selain berfungsi sebagai pencegah, CCTV juga memungkinkan pemantauan secara langsung (real-time), yang memberikan keuntungan besar dalam merespons situasi darurat dengan cepat.

Mesin Electronic Data Capture juga menjadi salah satu faktor penghambat. Dengan hanya mengandalkan mesin Electronic Data Capture (EDC) yang disediakan oleh Bank Kaltimara maka dapat menghambat proses pengawasan apabila terjadi kendala kerusakan pada mesin. Dengan pengurusan yang lambat, membuat mesin Electronic Data Capture (EDC) terkadang tidak bisa dioperasikan. Oleh karena itu, fasilitas sumberdaya menjadi penting dalam meluncurkan proses pengawasan yang dilakukan.

Oleh karena itu, ketersediaan fasilitas yang memadai sangat penting untuk menunjang efektivitas pengawasan. Kekurangan peralatan seperti CCTV dan mesin EDC di Dinas Perhubungan Kota Samarinda menyebabkan pengawasan kurang optimal. CCTV berperan penting dalam pemantauan dan keamanan, sedangkan kendala pada mesin EDC menghambat proses pengawasan. Karena itu, peningkatan fasilitas dan sumber daya perlu dilakukan agar kegiatan pengawasan berjalan lebih efektif.

5. Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Masyarakat merupakan aktor penting dalam menunjang keberhasilan pengawasan sistem parkir elektronik. Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang menghambat efektivitas pengawasan dalam sistem parkir elektronik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rauf (2020) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap keberhasilan sebuah program. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maritza dan Taufiqurokhman (2024), menunjukkan bahwa masyarakat sipil yang aktif dalam melakukan pengawasan pemerintah, advokasi kebijakan, pemberdayaan masyarakat, serta pendidikan dan kesadaran publik, maka dapat meningkatkan

efektivitas dari sebuah organisasi. Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, menunjukkan bahwa keberhasilan program dan efektivitas lembaga sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dan pengawasan dari masyarakat.

Berdasarkan temuan dilapangan yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa masyarakat kota samarinda belum secara aktif berpartisipasi dalam mendukung program sistem parkir elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap manfaat sistem parkir elektronik masih rendah. Kurang luasnya sosialisasi serta kebiasaan masyarakat yang masih terbiasa dengan sistem parkir konvensional turut menghambat penerapan program ini secara optimal.

Dalam pengawasan sistem parkir elektronik, masyarakat diharapkan dapat beradaptasi dengan metode pembayaran digital yang diterapkan. Namun, kebiasaan yang telah mengakar dalam menggunakan uang tunai menjadi kendala utama dalam peralihan sistem ini. Banyak masyarakat yang masih merasa lebih nyaman dan percaya dengan transaksi tunai dibandingkan pembayaran elektronik. Selain itu, kultur dan pola pikir yang belum terbiasa dengan sistem parkir elektronik memperburuk situasi. Kurangnya sosialisasi dan edukasi yang memadai mengenai manfaat serta cara penggunaan sistem ini membuat masyarakat cenderung enggan untuk berubah.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan faktor penghambat dalam Pengawasan Sistem Parkir Elektronik Oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda adalah masih terdapat kurangnya kejelasan standar pengawasan yang jelas disebabkan oleh tidak adanya aturan tertulis yang mengatur tugas pengawas E-Parking. Kemudian, tidak adanya target khusus pada Sistem Parkir Elektronik yang membuat acuan target pengawasan menjadi tidak terarah. Lalu, keterbatasan sumberdaya manusia yang dimana rasio pengawas dan juru parkir yang tidak seimbang juga menghambat efektivitas pengawasan. Adanya keterbatasan fasilitas peralatan penunjang pengawasan Sistem Parkir Elektronik. Dan minimnya partisipasi aktif dari masyarakat guna membantu mengawasi bersama agar program ini dapat berjalan optimal. Oleh karena itu, menjadi tantangan tersendiri dalam peningkatan pengawasan guna mencapai tujuan program Sistem Parkir Elektronik.

Saran

Berdasarkan Berbagai kendala yang ditemukan dalam Pengawasan Sistem Parkir Elektronik Oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda, maka beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas program ke depan antara lain:

1. Pembuatan Standar Operasional Prosedur Pengawas E-Parkir

Pemerintah Kota melalui Dinas Perhubungan Kota Samarinda agar segera merancang dan membuat standar operasional prosedur baik secara tertulis maupun digital yang menjelaskan mengenai skema pengawasan yang dilakukan pada sistem parkir elektronik. Dengan adanya standar, maka dapat mempermudah seorang pengawas dalam menjalankan perannya ataupun mempermudah dalam hal evaluasi yang dilakukan.

2. Adanya Penetapan Target Khusus.

Dengan tidak adanya target secara spesifik maka mengakibatkan pengukuran menjadi abstrak dan tidak terarah. Oleh karena itu peneliti memberikan rekomendasi kepada pihak Dinas Perhubungan Kota Samarinda berupa adanya pembuatan target secara khusus pada sistem parkir elektronik agar pengawas dapat lebih fokus dalam meningkatkan kualitas layanan parkir dan meminimalisir potensi masalah operasional. Penetapan target yang mandiri juga memungkinkan pengawasan menjadi lebih terstruktur dan terfokus pada efisiensi sistem parkir elektronik itu sendiri.

3. Adanya Penambahan Fasilitas Penunjang Pengawasan.

Perlu adanya pengadaan CCTV di setiap titik lokasi E-Parking, dan penyediaan mesin *Electronic Data Capture* (EDC) secara mandiri, sehingga dengan hal tersebut dapat mempermudah proses pengawasannya yang dilakukan. Dengan adanya fasilitas yang mumpuni membuat proses pengawasan menjadi optimal dan dapat meningkatkan kinerja program.

4. Adanya Penambahan Sumber Daya Manusia

Diperlukan adanya penambahan sumberdaya manusia dalam melaksanakan pengawasan sistem parkir elektronik. Dengan melihat rasio yang tidak sebanding antara pengawas dan juru parkir membuat program ini tidak tersinergi dengan optimal. Adanya penambahan sumberdaya manusia maka mempermudah pengawas baik dalam mengawasi juru parkir ataupun pemeriksaan retribusi parkir.

5. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat aktif sangat penting dalam menciptakan sistem parkir yang tertib, efisien, dan transparan. Salah satu bentuk dukungan yang dapat dilakukan adalah dengan mematuhi ketentuan penggunaan sistem parkir elektronik, seperti membayar tarif parkir secara elektronik sesuai prosedur, membantu mengawasi dan melaporkan apabila terjadi kecurangan atau penyimpangan yang dilakukan oleh juru parkir.

Daftar Pustaka

- Akbar, Yogi Gumilar Saeful. (2022). Kajian dalam Pengawasan Sistem Parkir Elektronik di Kota Bandung. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*
- Anam dan Anwar. (2020). Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pelayanan Publik. Volume 10 Nomor 1. Hal 61-65
- Artamalia, D. E., & Prabawati, I. (2019). Evaluasi Program E-Parking Di

- Kawasan Parkir Balai Kota Surabaya. Publika, 7(3), 1–8.
- Dipo, et al. (2025). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Pekanbaru. Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4, No. 3
- Habsy, B. A. (2017). Seni Memahami Penelitian Kuliitatif Dalam Bimbingan Dan Konseling: Studi Literatur. JURKAM: Jurnal Konseling Andi Matappa, 1(2), 90.
- Hadijah. (2016). Pengaruh Parkir Badan Jalan Terhadap Kinerja Ruas Jalan. Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Metro.
- Irawan, B. (2023). Manajemen Publik. Sleman: The Journal Publishing.
- Octavianus, et al. (2024). Efektivitas CCTV dan Teknologi Pengawasan Tidak Langsung Dalam Meningkatkan Keamanan Lalu Lintas. Journal of Information and Information Security. Vol. 5, No. 2, hal 257
- Omposunggu, et al. (2019). Analisis Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Indonesia. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP), 78–86.
- Pahlevi, et al. (2023). Implementasi Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Parkir Nontunai Di Kota Samarinda. 10(2), 230–239.
- Peraturan Walikota Samarinda Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Parkir Non Tunai
- Permana, Achep Satria & Agustina, Dwi. (2022). Pengaruh Pengawasan Dan Pelayanan Fasilitas Baggage Handling System Terhadap Tingkat Kepuasan Penumpang Garuda Airline Di Terminal 3 Bandara Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI. 2(6), 696–704.
- Rauf, Eka Ubaya Taruna. (2020). Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Keberhasilan Proyek Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sukoharjo III Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu. Hal 11-14
- Salama, dan Manuri. (2023). Pengawasan Pelaksanaan Protokol Kesehatan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua. Jurnal Konstituen Vol.4 (2), April 2022: 145-160
- Satriardi. (2016). Pengaruh Pengawasan Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru Pada SD Negeri Binaan Tanjung Pinang. Jurnal Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tanjung Pinang, 290.
- Setiadewi, et al. (2019). Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Klungkung. Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik. Hal 29
- Sitorus. (2012). Pengaruh Dimensi-Dimensi Pengawasan Terhadap Perilaku Apatur Dalam Pelayanan Perijinan Pada Dinas Perindustrian Dan

Perdagangan Kota Medan. Hal 64-73

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 910/1867/SJ Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Zailani, R., & Edi Subarkah. (2022). Pengaruh Pengawasan Kerja Terhadap Disiplin Kerja (Studi Kasus Manajemen Angkasa Rumah Makan Rata-Rata). *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan*, 1(3), 60–65